

Judul : Dukung program warga wajib punya rekening, Komisi II sarankan perbaikan sistem administrasi penduduk
Tanggal : Sabtu, 12 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung Program Warga Wajib Punya Rekening Komisi II Sarankan Perbaikan Sistem Administrasi Penduduk

Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas menyeroi rencana Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh warga memiliki rekening bank agar penyaluran bansos melalui *cash transfer* tepat sasaran. Rencana itu perlu dibarengi dengan pembenahan administrasi kependudukan (*adminduk*).

MENURUT Giri, data penduduk yang rapi serta valid jadi fondasi utama untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Keadilan bagi masyarakat bisa terwujud jika sistem *adminduk* dikelola dengan baik. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah terkait dengan perekaman data seluruh warga negara.

Program pembukaan rekening itu, kata dia, merupakan langkah baik yang membutuhkan dukungan data kependudukan valid. Pemerintah perlu memastikan seluruh warga negara memiliki data kependudukan yang terdata dengan rapi. "Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemda memegang peran utama menjamin perekaman data seluruh penduduk," ujarnya, Kamis (10/9/2026).

Karena itu, dia meminta percepatan perekaman data kependudukan hingga ke pelosok daerah segera dilakukan. Langkah itu dijalankan agar Pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menentukan penerima

berbagai program bantuan. Pendataan di kawasan terpencil membuat data jadi semakin valid dan keadilan sosial terwujud.

Dalam hal ini, dia meminta Pemda menjadi ujung tombak proses pendataan dan perekaman kependudukan warga. Peran itu perlu dilakukan secara terpadu bersama perangkat pemerintahan hingga tingkat desa. Kolaborasi aparat di seluruh tingkatan bisa mengoptimalkan pencatatan identitas masyarakat di daerah secara menyeluruh serta terstruktur.

Di waktu yang sama, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri perlu memberikan dukungan anggaran, agar proses pendataan serta perekaman bisa dilakukan secara optimal. "Bantuan keuangan itu mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, hingga insentif bagi daerah yang berhasil mencapai target perekaman secara penuh," terangnya.

Kata Giri, jika data kependudukan telah valid rencana pembukaan rekening bank bagi seluruh



Giri Ramanda Kiemas

warga negara akan lebih mudah diwujudkan. Penyaluran bantuan melalui rekening warga bisa berjalan dengan tepat dan transparan. Ini sekaligus menjamin dana bantuan mengalir langsung ke penerima demi mewujudkan keadilan sosial masyarakat.

Pembenahan administrasi kependudukan, lanjut Giri, bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan bagian utama untuk memastikan program Pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak. "Data kependudukan yang juga jadi kunci agar kebijakan perlindungan sosial nasional berjalan efektif, lancar, dan berkeadilan secara merata," ujarnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar

mengingatkan Pemerintah untuk memastikan program pembukaan rekening memprioritaskan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Warga yang sudah memiliki rekening di bank lain tidak boleh dibukakan lagi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurutnya, kunci keberhasilan program kepemilikan rekening bagi 200 juta warga lebih ini terletak pada verifikasi serta validasi data penerima di lapangan. Langkah identifikasi awal sangat berguna mencegah penumpukan insentif. "Data wajib diverifikasi secara cermat agar tidak terjadi penerimaan rekening atau dana secara ganda," tegasnya.

Selanjutnya, insentif saldo awal Rp 50 ribu dari Pemerintah bisa berdampak luas jika difokuskan bagi warga daerah terpencil dengan hambatan geografis maupun finansial. Namun, efektivitas inklusi keuangan tidak boleh hanya diukur dari kuantitas rekening yang dicetak. Literasi keuangan dibutuhkan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan secara bijak.

Guna menjaga akuntabilitas anggaran, Pemerintah bersama perbankan pelaksana perlu rutin melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Pemantauan itu mencakup identifikasi

profil penerima hingga keaktifan transaksi rekening. "Evaluasi dilakukan untuk memeriksa ketepatan sasaran, mencegah potensi rekening ganda, dan mengukur pemanfaatan oleh masyarakat umum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden meminta agar seluruh warga Indonesia memiliki rekening. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diinstruksikan membuat rekening mengacu data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Fasilitas itu otomatis diberikan bagi warga berusia 17 tahun serta memiliki KTP.

Data Dukcapil itu, kata Airlangga, nantinya diselaraskan dengan sistem di Bank Indonesia, terutama terkait sistem pembayaran dan gerbang transaksi. Guna memperluas jangkauan perbankan, skema ini menggunakan QRIS. Langkah itu disiapkan agar tingkat literasi serta inklusi keuangan nasional bisa mencapai hasil yang jauh lebih optimal.

Berbagai program bantuan Pemerintah nantinya disalurkan langsung ke rekening masyarakat itu. Data Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan, inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen. ■ PYB